

## **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik**

**Pingkan Ardhana Rheswari<sup>1</sup>, Fajar Syaiful Akbar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[pingkanardhanar@gmail.com](mailto:pingkanardhanar@gmail.com), [fajarsa.ak@upnjatim.ac.id](mailto:fajarsa.ak@upnjatim.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to test and analyze comparisons of financial performance before and after the Covid-19 pandemic in the Gresik district government. The population used in this study is the financial data of the Gresik Regency government located in the province of East Java. This research is quantitative descriptive research. This study uses secondary data in the form of budget realization reports. Sampling techniques use documentation methods. Analytical techniques in this study use quantitative descriptive analysis. The results of this study show that the effectiveness ratio of PAD with an average of 104% is already classified as very effective, the ratio of regional financial independence with an average of 251% is already included in the pattern of participatory relations, the ratio of fiscal decentralization degrees is on average 32% and has been included in the category quite well. The average compatibility ratio of operating expenditure is 75% and capital expenditure is 11%. An average financial efficiency ratio of 84% is already quite efficient.*

**Keywords:** *effectiveness ratio of PAD; regional financial independence ratio; fiscal decentralization degrees ratio; operating expenditure ratio; financial efficiency ratio*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada pemerintah daerah kabupaten Gresik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *dokumentasi*. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD dengan rata-rata 104% sudah tergolong sangat efektif, Rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata 251% sudah tergolong dalam pola hubungan partisipatif, Rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata 32% dan sudah masuk dalam kategori cukup baik. Rasio keserasian belanja rata rata belanja operasi 75 % dan belanja modal 11%. Rasio efisiensi keuangan rata rata 84% sudah cukup efisien.

**Kata kunci:** *Rasio efektivitas PAD; Rasio kemandirian keuangan daerah; Rasio derajat desentralisasi fiskal; Rasio keserasian belanja; Rasio efisiensi keuangan*

### **PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi luas bagi masyarakat di seluruh wilayah yang terjangkau termasuk di Indonesia. Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat di himbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran

Covid-19. Berbeda dengan negara lain yang melakukan lockdown, pemerintah Indonesia dengan kebijakan social distancing dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi (Nasution, 2020). Kebijakan ini sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia yang sebelumnya bebas menjadi sangat terbatas

Pada era reformasi saat ini peluang dalam pemerataan pembangunan terlihat lebih adil dan seimbang. Paradigma ini direalisasikan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah merupakan organisasi untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan sendiri memiliki tujuan menyediakan layanan dan kemampuan dalam meningkatkan layanan di masa yang akan datang, peningkatan pelayanan tersebut sangat berdampak pada masyarakat.

Pemerintah juga diberi wewenang untuk meningkatkan layanan di masa sekarang atau dimasa yang akan datang, demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu ditingkatkan lagi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan agar dapat lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dapat berpotensi dalam menciptakan peluang dan tantangan persaingan global. IMF memberikan prediksi ekonomi global akan menurun tajam dari perkiraan awal menjadi berada pada angka minus 3 persen. (Kemenkeu.go.id). Bahkan, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka minus 0,4 persen (VOAIndonesia, n.d.). Dampak ini juga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan di semua daerah di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa pada penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota dan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan baik. Dari penjelasan penyelenggaraan tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 memiliki pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal kinerja pemerintah sangat amat penting untuk dianalisis dan diukur agar dapat memberi

gambaran khusus mengenai kemampuan suatu daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah daerah juga dituntut meningkatkan pemerataan dan keadilan. Tuntutan ini berpengaruh pada kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah. Tugas yang diberikan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan di bidang keuangan yang sangat besar. Desentralisasi fiskal selalu dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam ketersediaan barang dan jasa publik. Dengan tingkat kemandirian yang besar maka daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak menutup kemungkinan jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu mendapat dana perimbangan. Dana perimbangan tetap digunakan untuk mempercepat pembangunan daerah. Meningkatkan dan mengelola PAD merupakan tantangan dalam meningkatkan pembangunan daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang memperlambat suatu daerah agar mandiri yaitu, lebih dominan transfer ke pusat daripada ke daerah, BUMD kurang berperan, terlalu fokus pada tingginya derajat desentralisasi sektor pajak, akan tetapi hanya sedikit yang dioptimalkan pada sumber penerimaan dan pemberian subsidi yang lemah dari pemerintahan pusat.

Menurut Armstrong dan Baron (1998) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Salah satu bentuk dari pengukuran kinerja adalah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggung jawaban daerah berupa perhitungan APBD

Kemampuan kinerja yang baik akan memberikan dampak yang baik juga terhadap pembangunan daerah. APBD menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, APBD juga dapat disebut cerminan dari program yang dilaksanakan pemerintah selama masa periode tertentu. Kemampuan pemerintah daerah kabupaten Gresik dalam mengelola keuangan daerah termasuk dalam APBD langsung maupun APBD tidak langsung dalam memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai tugas-tugas pemerintah pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Menurut Mutiha (2016) Untuk mengukur kemampuan kinerja suatu pemerintah daerah perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dapat dikatakan mandiri, efisien, efektif dan akuntabel sebagai tolak ukur penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah. APBD juga memiliki fungsi penting bagi pemerintah diantaranya yaitu, sebagai sarana dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada pemerintah, sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi daerah, sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah daerah pada masyarakatnya dalam segala kegiatan dan hasil kinerja pemerintah selama periode tertentu, sebagai sarana

untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan pada daerah disetiap periode anggaran, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran pada tahunan berikutnya, sebagai pencegahan terjadinya kebocoran anggaran, serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan publik.

Pengukuran APBD akan di buat Pemerintah Daerah setelah masa periode anggaran berakhir pengukuran ini merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD. Salah satu Teknik yang paling banyak digunakan yaitu analisis rasio keuangan

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional, melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mendapat predikat A dan termasuk kategori terbaik setiap tahunnya. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan otonomi daerah yang didukung oleh banyak faktor. Yaitu faktor yang paling utama adalah faktor keuangan. Faktor ini sangat penting karena berupa sumber daya finansial untuk pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam sebuah anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin berkembangnya jumlah industri dan pengolahan di Kabupaten Gresik, diharapkan mampu menaikkan PDRB setiap tahun dan memberikan kontribusi lebih penerimaan pajak dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada laporan APBD.

Laporan keuangan bersifat general purposive, dimana laporan keuangan dibuat lebih umum dan lebih sederhana untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca ataupun pemangku kepentingan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Ketidakmampuan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan dapat dibantu dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan.

Analisis ini diharapkan untuk menjadi alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam upaya merealisasikan pendapatan daerah serta mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah.

Dampak pandemi Covid 19 di Gresik sangat terasa, ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan sangatlah mengganggu mobilitas masyarakat sehari-hari. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Lapangan usaha yang mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan. Sementara status pekerjaan yang mengalami dampak paling parah yaitu pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak

tetap. Namun setelah pelaksanaan new normal diterapkan kegiatan perekonomian mulai berangsur-angsur membaik, dan kegiatan berlangsung seperti biasanya

Pendapatan di Kabupaten Gresik di prediksi anjlok 50% akibat Corona. DPRD telah setuju mengenai anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3,56 Triliun. Salah satu sumber pemasukan berasal dari PAD pada tahun 2019 target PAD Kabupaten Gresik sebesar Rp 560 miliar. Sedangkan tahun 2020 naik menjadi Rp 760 miliar diduga PAD mengalami peningkatan sebesar Rp 200 miliar, target kenaikan tersebut berasal dari pajak daerah, seperti, Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pada tahun 2019 target PAD direalisasikan hingga menembus angka 103%. Namun target PAD tahun 2020 terlihat sulit karena pandemi Covid-19 yang terjadi. Wabah covid ini terjadi sangat mempengaruhi semua sector perekonomian. Pendapatan bisa turun drastis akibat sepi pembeli. Data IMB saat yang masuk hanya tercatat Rp 9,6 miliar dari Rp 80 miliar yang ditargetkan. Padahal tahun kemarin karena tidak ada batasan pandemi covid-19 mampu direalisasikan. Pada rasio kemandirian daerah menunjukkan bahwa pemerintah mampu sendiri membiayai kegiatan pelayanan masyarakat contohnya membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dan juga dapat diukur pada rasio efektivitas daerah, juga menggambarkan keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan.

Pada tahun 2020 DPRD dan Pemerintahan Kabupaten Gresik telah menyelesaikan rapat paripurna yang membahas tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) dalam rapat ini semua setuju dan sepakat mengenai penurunan pendapatan daerah. PAD diturunkan menjadi Rp 2,8 triliun. Sedangkan belanja daerah Rp 3,3 triliun. Penurunan terjadi di semua sektor, untuk PAD ditetapkan Rp 1,163 triliun namun setelah APBD dirubah diperkirakan turun menjadi Rp 851 miliar, kemudian target dana perimbangan sebelum P-APBD sebesar Rp 1,498 triliun, namun setelah perubahan turun sebesar 9,52 menjadi Rp 1,355 triliun. Target lainnya setelah perubahan diperkirakan berkurang Rp 642 miliar. Berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa merealisasikan perubahan tersebut dan dalam setiap pembahasan diambil terkait dengan mekanisme penganggaran selalu disertai dengan hukum. Dalam penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tetap di prioritaskan pada penanganan covid-19 serta dampak yang ditimbulkan termasuk optimalisasi program kegiatan. Agar mencapai target yang sudah ditetapkan Bupati Gresik menyambut baik hasil keputusan P-APBD karena anggaran ini cukup signifikan di banding tahun sebelumnya, karna hampir dialami seluruh OPD ditambah pihaknya berkomitmen untuk segera melaksanakan dan merealisasikan P-APBD tersebut secepat mungkin.

Pada Pemerintahan Kabupaten Gresik tahun 2020 terdapat revisi pada APBD, Menurut Musa, ketua Fraksi Partai Nadsem DPRD diantaranya rendahnya alokasi anggaran yaitu untuk pengentasan kemiskinan. selain itu, anggaran untuk penuntasan banjir tahunan Kali Lamong. Seharusnya sektor-sektor ini menjadi prioritas. Defisit ini tercatat lebih dari Rp 100 miliar, belanja tahun depan di proyeksikan Rp 3,57 triliun. Menurut pendapat Magdalena (2012) bahwa

pengukuran kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi termasuk indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Dengan ditambahkan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan dengan menarik investor untuk membuka usaha, seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya jumlah pengangguran dan kemiskinan

**Tabel 1.**

**Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Belanja Daerah</b>
2018	2,876,343,695,519.71	2,679,865,980,877.73
2019	3,119,200,157,022.91	2,980,713,768,844.41
2020	2,939,447,566,194.07	3,095,541,249,535.02
2021	3,133,320,785,111.72	3,192,751,693,289.33

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa realisasi pendapatan semakin meningkat seiring dengan belanja daerahnya. Akan Tetapi besarnya belanja sama dengan pendapatan maka disimpulkan pemerintah tersebut tidak dapat menyimpan pendapatannya untuk keperluan tahun berikutnya. Meskipun belanja yang semakin meningkat dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

Menurut Marijana Badun (2009) mengatakan sistem keuangan memacu pertumbuhan ekonomi dan hal terpenting untuk mengetahui kapan dan dalam keadaan apa sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan apa yang menentukan efisiensi sehingga pemerintah berperan penting untuk mengetahui kapan sistem keuangan berubah lebih baik atau buruk. Maka untuk itu pemerintah harus mengetahui apakah dana transfer yang digunakan sebagai belanja daerah dapat memperbaiki prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan investasi yang optimal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan dianalisis adalah mencakup komposisi APBD, baik penerimaan seperti pendapatan, dan alokasi belanja. Analisis mengenai penerimaan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah agar dapat menjadi pemasukan daerah. Sedangkan analisis belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah melakukan alokasi sumberdaya untuk aktivitas pembangunan.

Dengan adanya fenomena tersebut yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan berbasis rasio mengenai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, karena ingin mengetahui bagaimana gambaran kinerja pemerintahan Kabupaten Gresik jika semua terealisasi dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan, juga sejauh

mana Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan sosial bagi masyarakat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”**.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana rasio efektifitas daerah, rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian belanja, rasio efisiensi keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik di masa pandemic

Objek dari penulisan penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik di masa pandemic. Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah data keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur. Maka data sampel yang diperoleh dari sampel penelitian ini adalah sebesar 4 pengamatan, yaitu 4 tahun laporan realisasi anggaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, data yang dimaksud meliputi laporan realisasi anggaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dekomunitasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Variabel Rasio Efektivitas PAD**

Tabel 2. Rasio Efektivitas PAD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sebelum Covid-19

<b>Rasio efektivitas PAD</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Kemampuan Daerah</b>
2018	957.255.706.268,71	921.926.953.257,00	104%	Sangat Efektif
2019	980.776.381.995,43	923.973.075.519,70	107%	Sangat Efektif

Tabel 3. Rasio Efektivitas PAD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sesudah Covid-19

<b>Rasio efektivitas PAD</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Kemampuan Daerah</b>
2020	924.657.913.563,07	816.210.832.745,35	114%	Sangat Efektif
2021	1,031,134,325,306.72	1,153,264,477,750.00	90%	Tidak Efektif

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi. Berdasarkan perhitungan

pada Rasio Efektivitas PAD dan terlihat pada tabel 2. dan 3. dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sebesar 104%, naik di tahun 2019 menjadi 107%, kemudian naik di tahun 2020 menjadi 114%, dan di tahun 2021 turun drastis menjadi 90%, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang tidak lain disebabkan oleh pandemi covid-19 dari 114% menjadi 90%.

#### **Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sebelum Covid-19

<b>Rasio Kemandirian Keuangan</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli daerah</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Kemampuan Daerah</b>
2018	957.255.706.268,71	1.425.168.417.026,00	67%	Partisipatif
2019	980.776.381.995,43	1.467.854.957.330,00	66%	Partisipatif

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sesudah Covid-19

<b>Rasio Kemandirian Keuangan</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli daerah</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Kemampuan Daerah</b>
2020	924.657.913.563,07	1.331.644.546.291,00	70%	Partisipatif
2021	1.031.134.325.306,72	1.388.743.965.408,00	74%	Partisipatif

Berdasarkan tabel 4. dan 5. diatas dapat diuraikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Gresik mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 sebesar 67% lalu di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 66%. Di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 70%. Dan naik menjadi 74% di tahun 2021. Secara keseluruhan jika dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gresik adalah sedang. Sedangkan jika dilihat dari pola hubungan di Kabupaten Gresik adalah partisipatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat rendah.

#### **Variabel Rasio Desentralisasi Fiskal**

Tabel 6. Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sebelum Covid-19

<b>Rasio Desentralisasi Fiskal</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli daerah</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Kemampuan Daerah</b>
2018	957.255.706.268,71	2.876.343.695.519,71	33%	Cukup
2019	980.776.381.995,43	3.119.200.157.022,91	31%	Cukup

Tabel 7. Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sesudah Covid-19

Rasio Desentralisasi Fiskal				
Tahun	Pendapatan Asli daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio %	Kemampuan Daerah
2020	924.657.913.563,07	2.939.477.566.194,07	31%	Cukup
2021	1,031,134,325,306.72	3.133.320.785.111,72	33%	Cukup

Berdasarkan penghitungan di tabel 6. dan 7. mengenai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik di tahun 2018-2021 sebelum dan sesudah pandemi dapat diuraikan bahwa rasio terendah yakni di tahun 2018 sebesar 33%, pada tahun 2019 menurun menjadi 31%, di tahun 2019 tetap 31% dan di tahun terakhir 2021 diakhir masa pandemi naik menjadi 33%. Secara keseluruhan rata-rata Derajat Desentralisasi di Kabupaten Gresik dari tahun 2018-2021 sebesar 32% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan daerah cukup baik.

#### Variabel Rasio Keserasian Belanja

Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja Pemerinta Daerah Kabupaten Gresik Sebelum Covid-19 (Belanja Operasi)

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio %
2018	1.745.933.786.564,64	2.118.545.900.336,73	82%
2019	1.860.858.582.907,07	2.399.289.318.844,41	77%

Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja Pemerinta Daerah Kabupaten Gresik Sesudah Covid-19 (Belanja Operasi)

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio %
2020	1.926.189.454.855,21	2.485.716.405.435,02	77%
2021	2.107.828.823.192,18	3.192.751.693,289,33	66%

Tabel 10. Rasio Keserasian Belanja Pemerinta Daerah Kabupaten Gresik Sebelum Covid-19 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio %
2018	369.883.330.557,33	2.118.545.900.336,73	17%
2019	281.697.688.881,65	2.399.289.318.844,41	9%

Tabel 11. Tabel 10. Rasio Keserasian Belanja Pemerinta Daerah Kabupaten Gresik Sesudah Covid-19 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio %
2020	281.697.688.881,65	2.485.716.405.435,02	11%
2021	298.579.850.432,56	3.192.751.693,289,33	9%

Rasio Keserasian dibagi menjadi Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi di tabel penghitungan 8. dan 9. terlihat bahwa

Kabupaten Gresik mengalami penurunan terus menerus dari sebelum sampai setelah pandemi, di tahun 2018 sebesar 82%. Lalu mengalami penurunan tahun 2019 menjadi 77% lalu di tahun 2020 tidak berubah atau tetap menjadi 77% dan di tahun 2021 menurun menjadi 66%.

Sedangkan di Rasio Belanja Modal di penghitungan 10. dan 11. terlihat bahwa Kabupaten Gresik pada tahun 2018 jumlah belanja modalnya sebesar 17%. Dimana mengalami fluktuasi atau naik turun di tahun 2019 menjadi 9%, di tahun 2020 naik menjadi 11% dan turun lagi menjadi 9% di tahun 2021.

### Variabel Rasio Efisiensi Keuangan

Tabel 12. Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sebelum Covid-19

Rasio Efisiensi Keuangan				
Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio %	Kemampuan Daerah
2018	2.118.545.900.336,73	2.876.343.695.519,71	73%	Efisien
2019	2.399.289.318.844,41	3.119.200.157.022,91	77%	Efisien

Tabel 13. Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sesudah Covid-19

Rasio Efisiensi Keuangan				
Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio %	Kemampuan Daerah
2020	2.485.716.405.435,02	2.939.477.566.194,07	84%	Cukup Efisien
2021	3.192.751.693,289,33	3.133.320.785.111,72	101%	Tidak efisien

Berdasarkan perhitungan tabel 4.11 dan 4.12 pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sebelum dan sesudah pandemi diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan secara terus menerus. Dimana pada tahun 2018 rasio efisiensi keuangannya sebesar 73%, naik menjadi 77% di tahun 2020 dan tahun 2021 naik lagi dari 84% ke 101%.

### UJI PARSIAL T-test

Paired Samples Test									
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	RASIO_EFEKTIVITAS_SEBEL UM_COVID - RASIO_EFEKTIVITAS_SESUD AH_COVID	3.50000	19.09188	13.50000	-168.03376	175.03376	.259	1	.839

Gambar 1. Hasil Uji Paired Samples Test

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Efektivitas Daerah. Berdasarkan tabel uji *Paired Sample test* diatas diketahui nilai sig adalah 0,839 > 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	RASIO_KEMANDIRIAN_DAERAH_SEBELUM_COVID - RASIO_KEMANDIRIAN_DAERAH_SESUDAH_COVID	-5.50000	3.53553	2.50000	-37.26551	26.26551	-2.200	1	.272

Gambar 2. Hasil Uji Paired Samples Test

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Kemandirian Daerah. Berdasarkan tabel uji *Paired Sample* test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,272 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	RASIO_DERAJAT_DESENTRALISASI_FISKAL_SEBELUM_COVID - RASIO_DERAJAT_DESENTRALISASI_FISKAL_SESUDAH_COVID	.00000	2.82843	2.00000	-25.41241	25.41241	.000	1	1.000

Gambar 3. Hasil Uji Paired Sampes Test

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Berdasarkan tabel uji *Paired Sample* test diatas diketahui nilai sig adalah  $1000 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	RASIO_KESERASIAN_BELANJA_OPERASI_SEBELUM_COVID - RASIO_KESERASIAN_BELANJA_OPERASI_SESUDAH_COVID	8.00000	4.24264	3.00000	-30.11861	46.11861	2.667	1	.228

Gambar 4. Hasil Uji Paired Samples Test

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Belanja Operasi. Berdasarkan tabel uji *Paired Sample* test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,228 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	RASIO_KESERASIAN_BELANJA_MODAL_SEBELUM_COVID - RASIO_KESERASIAN_BELANJA_MODAL_SESUDAH_COVID	3.00000	4.24264	3.00000	-35.11861	41.11861	1.000	1	.500

Gambar 5. Hasil Uji Paired Sample Test

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Belanja Modal. Berdasarkan tabel uji *Paired Sample* test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,500 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	RASIO_EFISIENSI_KEUANGA N_SEBELUM_COVID - RASIO_EFISIENSI_KEUANGA N_SESUDAH_COVID	-17.50000	9.19239	6.50000	-100.09033	65.09033	-2.692	1	.226

Gambar 6. Hasil Uji Paired Sample Test

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Efisiensi Keuangan. Berdasarkan tabel uji *Paired Sample* test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,500 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## PEMBAHASAN

### 1. Rasio Efektivitas PAD Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Sebelum dan Sesudah Covid-19

Pada hasil analisis menggunakan uji *Paired Sample T-test* dari Rasio efektivitas PAD bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah Covid-19, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,839. Efektivitas kinerja Kabupaten Gresik untuk tahun 2018-2019 tergolong sangat efektif karena hasil menunjukkan di atas 100% walaupun selanjutnya pada akhir 2021 mengalami penurunan tidak lain disebabkan oleh pandemi. Tetapi Hal tersebut tidak mempengaruhi apapun karena, menurut hasil perhitungan rata-rata pada Efektivitas PAD yakni diatas 100% yaitu 104%. Hal tersebut karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

### 2. Rasio Kemandirian Daerah Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Sebelum dan Sesudah Covid-19

Pada hasil analisis menggunakan uji *Paired Sample T-test* dari Rasio Kemandirian Daerah bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah Covid-19, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,272. Hasil yang diperoleh semakin tinggi Rasio Kemandirian memiliki arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, begitulah sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Gresik

tahun 2018-2020 sebelum dan sesudah pandemi masuk kedalam kategori sedang dan pola hubungan Partisipatif. Hal tersebut dibuktikan dari persentase hasil perhitungan diatas dan rata-rata rasio kemandirian secara keseluruhan sebesar 70% yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat rendah.

### **3. Rasio Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Sebelum dan Sesudah Covid-19**

Pada hasil analisis menggunakan uji *Paired Sample T-test* dari Rasio Desentralisasi Fiskal bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah Covid-19, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 1000. Hasil yang diperoleh Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Gresik dikatakan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung sesuai dengan porsinya atau pas. Peningkatan PAD setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri dengan rata-rata 32%, sehingga dapat disimpulkan bahwa cukupnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

### **4. Rasio Keserasian Belanja Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Sebelum dan Sesudah Covid-19**

Pada hasil analisis menggunakan uji *Paired Sample T-test* dari Rasio Keserasian Belanja bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah Covid-19, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu pada Rasio Belanja Operasi adalah 0,228 dan Rasio Belanja Modal adalah 0,500. Hasil yang diperoleh pada Rasio Keserasian Belanja diketahui rata-rata Rasio Belanja Operasi 75% dan Rasio Belanja Modal 11%. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif sangat kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

### **5. Rasio Efisiensi Keuangan Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Sebelum dan Sesudah Covid-19**

Pada hasil analisis menggunakan uji *Paired Sample T-test* dari Rasio Efisiensi Keuangan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah Covid-19, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,226. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Gresik sebesar 84% atau dapat dikatakan cukup efisien. Karena rasionya tepat 84%, hal tersebut mengartikan bahwa biaya yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk memperoleh pendapatannya sudah cukup atau sesuai. Dapat diartikan kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam hal ini sudah cukup baik dan dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Rasio Efektivitas PAD dengan rata-rata 104% sudah tergolong sangat efektif.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan rata-rata sebesar 251% sudah tergolong dalam pola hubungan partisipatif yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal rata-rata sebesar 32% dan sudah masuk dalam kategori cukup baik
4. Rasio Keserasian Belanja, rata-rata belanja operasi sebesar 75% dan belanja modalnya sebesar 11%. Dimana masih banyak mengalokasikan dananya di belanja operasi pada komponen belanja barang dan jasa yang masih relatif besar.
5. Dan Rasio Efisiensi Keuangan, Pemerintah Kota Surabaya rata-rata sebesar 84% dimana hal tersebut mengartikan bahwa kemampuan daerah sudah cukup efisien.

### **Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju.
2. Pada indikator Rasio Keserasian Belanja. Pemerintah daerah Kabupaten Gresik sebaiknya sedikit mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan daerahnya, karena dilihat dari rasio efisiensi belanja modal yang tergolong rendah, jika keuangannya daerahnya makin tidak efisien, maka alokasi belanja modal juga akan berkurang. Sehingga dapat terjadi efisiensi belanja daerah

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amstrong, Michael dan Angela Baron (1998). Performance Management. London: Institute of Personnel Development.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma & Sedana, Ida Bagus Panji. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-jurnal Manajemen Unud, 7,2
- Ardila, Isna, Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol 15, No. 1/ Maret 2015
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arthanaya, I Wayan "Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Kertha Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011, h. 178.

- Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. (2011). "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009". Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung.
- Bisma, I Dewa Gede & HerySusanto.(2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal, Gane C Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Mataram.
- BN Marbun, Kamus Politik, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2007, h. 350
- Emron Edison, Yohny Anwar, dan Imas Komariyah. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi. Bandung: Alfabeta.
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: hlm.145.
- Halim, Abdul (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Hany Akasah Radar Gresik. 2020. DPRD Gresik Gedok P-APBD 2020, Target Pendapatan Diturunkan. Diakses pada tanggal 22/12/21.  
<https://radargresik.jawapos.com/politika/politik-pemerintahan/08/09/2020/dprd-gresik-gedok-p-apbd-2020-target-pendapatan-diturunkan/amp/>
- Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm.  
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016. Moneter, 6(2), 179-188.
- Khusaini, Moh. 2018. Keuangan Daerah. Malang: UB Press
- Magdalena, Kludacz. (2012). Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals. The College of Economics and Social Sciences in Płock. Warsaw University of Technology Płock, Poland
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN. Mahmudi. 2015. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:BPFE. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI (anggota IKAPI)
- Marit, Lenny Elisabeth. Dkk (2021). Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Yayasan Kita menulis
- Media. 2019. APBD Kabupaten Gresik TA 2020 Cuma Rp 3,4 Triliun. Diakses pada tanggal 22/11/21. <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/apbd-kabupaten-gresik-ta-2020-cuma-rp-34-triliun/>
- Mutiha, A. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010 -2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
- Narendra Bakrie. 2020. Pendapatan Kabupaten Gresik Diprediksi Anjlok 50 Persen akibat Corona. <https://jatimnow.com/baca-26226-pendapatan-kabupaten->

- gresik-diprediksi-anjlok-50-persen-akibat-corona
- Nasution, Dito, A, D 2020 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Benefita* 5(2).
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2021. Penghargaan SAKIP. Diakses Pada tanggal 23/12/21 <https://gresikkab.go.id/info/penghargaan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah . 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah. 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Radar Gresik. 2021. Penghargaan SAKIP. Diakses Pada tanggal 23/12/21. Pemkab Gresik Kembali Sabet Penghargaan SAKIP Predikat A | Radar Gresik ([jawapos.com](http://jawapos.com))
- Ramli Faud (2016) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah
- Setiyo HN. 2019. Memahami Konsep Green Economy. Diakses pada tanggal 21/12/21. <https://www.ajarekonomi.com/2019/04/memahami-konsep-green-economy.html>
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung:CV Alfabeta
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Susanto, Hery. (2014). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. [repository.ut.ac.id](http://repository.ut.ac.id)
- Susanto, Hery. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram
- Susilawati, D., Wardana, L., K., & Rahmawati, I., F. (2018). Kinerja Keuangan Dengan Financial Ratio Analisis: Studi Kasus Bkad Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91-99.
- Undang-undang No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-undang No 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok tentang pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Jakarta.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta
- Undang-undang No. 33 tahun, 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Jakarta.
- VOA Indonesia. (n.d.). Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 bisa Minus 0,4 persen. VOA Indonesia. (Diakses, 26 Maret 2022) dari <https://www.voaindonesia.com/a/menkeudampak-Covid-19->

*Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 4 No 6 (2022) 1897-1913 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v4i6.1442

[pertumbuhanekonomiindonesia2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.ht](https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442)